

**PERAN NEGARA DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING EKONOMI GLOBAL
MELALUI KEBIJAKAN INDUSTRI GLOBAL VALUE CHAIN DAN
INDUSTRIALISASI DI INDONESIA**

Mulya Syafrina¹, Sumanti², Putri Yulia Mandasari³, Yusparni Yetti⁴, Febrio
Rozalmi Putra⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Dasar S2, Universitas Adzkia

mulyasyafrina1988@gmail.com¹, sumanti@adzkia.ac.id²,
putrimandasari488@gmail.com³, yusparniyeti12@admin.sd.belajar.id⁴,
febriorozalmiputra1350@gmail.com⁵

ABSTRACT

The global economy has increasingly integrated countries through trade, investment, technology transfer, and international production networks. In this context, the state plays a strategic role in enhancing national competitiveness through industrial policies, participation in Global Value Chains (GVCs), and industrialization. This study aims to analyze the role of the state in the global economy through Indonesia's industrial policy, integration into Global Value Chains, and industrialization strategies. The research employs a qualitative approach using a literature review method by examining books, scientific journals, government reports, and relevant academic publications. The findings indicate that the state has a crucial role in creating a conducive industrial ecosystem through regulatory support, infrastructure development, investment facilitation, and human resource improvement. Indonesia's participation in Global Value Chains has contributed to export growth, technology transfer, and industrial competitiveness. However, several challenges remain, including dependence on imported raw materials, technological limitations, low innovation capacity, and unequal industrial development across regions. To address these challenges, strengthening industrial policies, encouraging technological innovation, improving institutional capacity, and enhancing workforce quality are essential. The study concludes that effective state intervention remains necessary to support sustainable industrialization and strengthen Indonesia's position in the global economy. Through integrated industrial policies and greater participation in Global Value Chains, Indonesia can increase its competitiveness and achieve more inclusive and sustainable economic development.

Keywords: state role, global economy, industrial policy, global value chain, industrialization.

ABSTRAK

Ekonomi global yang semakin terintegrasi telah menghubungkan berbagai negara melalui perdagangan, investasi, transfer teknologi, dan jaringan produksi internasional. Dalam kondisi tersebut, negara memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing nasional melalui kebijakan industri, partisipasi dalam Global Value Chain (GVC), dan industrialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam ekonomi global melalui kebijakan industri Indonesia, keterlibatan dalam Global Value Chain, serta strategi industrialisasi yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode studi literatur melalui kajian berbagai buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berperan penting dalam menciptakan ekosistem industri yang kondusif melalui regulasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Keterlibatan Indonesia dalam Global Value Chain memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor, transfer teknologi, dan daya saing industri nasional. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti ketergantungan terhadap bahan baku impor, keterbatasan teknologi, rendahnya kapasitas inovasi, dan ketimpangan pembangunan industri antarwilayah. Oleh karena itu, penguatan kebijakan industri, peningkatan inovasi teknologi, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi negara yang efektif tetap diperlukan untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Kata Kunci: peran negara, ekonomi global, kebijakan industri, global value chain, industrialisasi.

A. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah menjadi salah satu fenomena yang paling berpengaruh dalam perkembangan perekonomian dunia pada abad ke-21. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga aktivitas ekonomi antar negara semakin terintegrasi. Arus perdagangan internasional, investasi asing langsung, serta transfer teknologi berkembang secara pesat dan menciptakan keterhubungan yang kuat antar negara. Menurut Stiglitz (2018), globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi yang memungkinkan negara-negara di dunia saling terhubung melalui perdagangan, investasi, dan pertukaran pengetahuan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Perkembangan globalisasi memberikan berbagai peluang bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan pasar dan peningkatan

aktivitas ekonomi. Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya persaingan antar negara dalam memperebutkan investasi, teknologi, dan pasar internasional. Dalam situasi tersebut, negara tidak dapat hanya berperan sebagai pengawas aktivitas ekonomi, tetapi harus menjadi aktor strategis yang mampu mengarahkan pembangunan ekonomi nasional agar memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global.

Perdebatan mengenai peran negara dalam pembangunan ekonomi telah berlangsung sejak lama. Pandangan ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith menekankan pentingnya mekanisme pasar dalam mengatur kegiatan ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara efektif. Menurut Chang (2002), keberhasilan pembangunan ekonomi di berbagai negara industri baru justru menunjukkan pentingnya keterlibatan negara dalam menciptakan kebijakan

yang mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing nasional.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, negara memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pembangunan. Negara bertugas menciptakan stabilitas ekonomi, menyediakan infrastruktur publik, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan regulasi yang mampu mendukung aktivitas ekonomi. Todaro dan Smith (2021) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi ekonomi yang besar untuk berpartisipasi dalam perekonomian global. Jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi geografis yang strategis memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Namun demikian, berbagai tantangan seperti rendahnya produktivitas industri, ketergantungan terhadap komoditas primer, dan keterbatasan penguasaan teknologi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu instrumen penting yang digunakan negara untuk meningkatkan daya saing ekonomi adalah kebijakan industri. Kebijakan industri merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor industri melalui pemberian insentif, pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, dan

perlindungan terhadap sektor strategis tertentu. Menurut Rodrik (2016), kebijakan industri merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi menuju sektor-sektor yang memiliki produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan industri sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi fokus utama adalah hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas domestik melalui proses pengolahan di dalam negeri sebelum dipasarkan ke pasar internasional. Dengan adanya hilirisasi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk industri yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Selain kebijakan industri, perkembangan ekonomi global juga ditandai oleh munculnya konsep *Global Value Chain* (GVC) atau rantai nilai global. Konsep ini menggambarkan bagaimana proses produksi suatu barang atau jasa dilakukan secara terintegrasi di berbagai negara sesuai dengan keunggulan masing-masing. Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon (2005) menyatakan bahwa *Global Value Chain* merupakan sistem produksi global yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi mulai dari penelitian, produksi, distribusi, hingga pemasaran produk akhir. Melalui GVC, negara berkembang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam jaringan produksi internasional dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Keterlibatan Indonesia dalam *Global Value Chain* menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing nasional. Melalui partisipasi dalam rantai nilai global, perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memperoleh akses terhadap teknologi, investasi, pasar internasional, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Akan tetapi, posisi Indonesia dalam rantai nilai global masih didominasi oleh aktivitas yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kapasitas industri nasional sehingga Indonesia dapat naik ke tahapan produksi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Industrialisasi merupakan strategi utama yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Menurut Harrod dan Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi pada sektor produktif, khususnya industri, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sejalan dengan itu, Todaro dan Smith (2021) menjelaskan bahwa industrialisasi merupakan proses transformasi ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara peran negara, kebijakan industri, keterlibatan dalam *Global Value Chain*, dan industrialisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam memperkuat daya saing ekonomi global melalui kebijakan industri, *Global Value Chain*, dan

industrialisasi di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran mengenai strategi pembangunan ekonomi yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) untuk menganalisis peran negara dalam memperkuat daya saing ekonomi global melalui kebijakan industri, *Global Value Chain* (GVC), dan industrialisasi di Indonesia. Kajian literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2018), kajian literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi ilmiah, meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi akademik yang membahas ekonomi global, kebijakan industri, *Global Value Chain*, dan industrialisasi. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penulis, serta keterbaruan informasi yang mendukung tujuan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan penelusuran berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus kajian. Literatur yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian substansi dengan tema

penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh sumber-sumber yang valid dan memiliki kontribusi terhadap pembahasan mengenai peran negara dalam pembangunan ekonomi global.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai dokumen atau sumber tertulis. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengelompokkan berbagai informasi berdasarkan tema-tema utama, yaitu peran negara dalam ekonomi global, kebijakan industri Indonesia, *Global Value Chain*, dan industrialisasi.

Selanjutnya, berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu dibandingkan, diinterpretasikan, dan disintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan negara dan pembangunan ekonomi dalam konteks global. Hasil sintesis tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun pembahasan dan menarik kesimpulan penelitian.

Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang berbeda. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai peran negara dalam memperkuat daya saing ekonomi global melalui kebijakan industri, *Global Value Chain*, dan industrialisasi di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Negara dalam Ekonomi Global

Perkembangan ekonomi global telah mengubah hubungan antarnegara menjadi semakin terintegrasi melalui perdagangan internasional, investasi, transfer teknologi, dan arus informasi. Dalam kondisi tersebut, negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses globalisasi memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Menurut Stiglitz (2018), globalisasi dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus mendorong daya saing ekonomi domestik.

Peran negara dalam ekonomi global tidak hanya terbatas pada fungsi regulasi, tetapi juga mencakup fungsi fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi. Negara bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi. Rodrik (2011) menyatakan bahwa keberhasilan suatu negara dalam menghadapi globalisasi sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan kapasitas pemerintah dalam mengelola perubahan ekonomi yang terjadi.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi berbagai kegagalan pasar (*market failure*). Mekanisme pasar sering kali tidak mampu mendistribusikan sumber daya secara optimal, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi. Menurut Mazzucato (2013), negara berperan

sebagai *entrepreneurial state* yang mampu mendorong inovasi dan menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi strategis pada sektor-sektor produktif.

Peran negara juga terlihat dalam upaya menciptakan stabilitas ekonomi makro yang menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha. Krugman dan Obstfeld (2018) menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi utama yang memungkinkan negara memperoleh manfaat maksimal dari integrasi ekonomi global.

Selain menciptakan stabilitas, negara juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor utama yang menentukan daya saing suatu bangsa. Becker (1993) melalui teori modal manusia menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperkuat daya saing ekonomi dalam jangka panjang.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas peran negara dalam ekonomi global. Pemerintah dituntut mampu menciptakan regulasi yang mendukung transformasi digital, keamanan data, serta pengembangan ekonomi berbasis inovasi. Schwab (2017) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah pola produksi dan perdagangan global sehingga negara perlu mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat dipahami

bahwa negara tetap memiliki posisi strategis dalam ekonomi global. Meskipun globalisasi mendorong peran pasar yang semakin besar, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tetap memerlukan intervensi negara yang efektif dalam menciptakan stabilitas, meningkatkan daya saing, dan mengarahkan transformasi ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan Industri sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Nasional

Kebijakan industri merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural. Dalam sejarah pembangunan ekonomi dunia, banyak negara yang berhasil mencapai kemajuan melalui penerapan kebijakan industri yang terencana dan berkelanjutan. Chang (2002) menjelaskan bahwa negara-negara maju saat ini pada awalnya juga menerapkan berbagai bentuk perlindungan industri dan intervensi pemerintah untuk memperkuat sektor industrinya.

Kebijakan industri bertujuan meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui pengembangan sektor-sektor yang dianggap strategis bagi perekonomian. Kebijakan tersebut dapat berupa pemberian insentif fiskal, perlindungan terhadap industri tertentu, pengembangan teknologi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas industri. Menurut Aiginger dan Rodrik (2020), kebijakan industri modern tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks negara berkembang, kebijakan industri

memiliki peran penting dalam mempercepat proses transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor manufaktur dan jasa modern. Todaro dan Smith (2021) menyatakan bahwa industrialisasi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan industri untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah pengembangan kawasan industri yang bertujuan menciptakan efisiensi produksi dan menarik investasi. Kawasan industri memungkinkan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat rantai pasok industri nasional.

Selain pengembangan kawasan industri, pemerintah juga mendorong hilirisasi sumber daya alam sebagai bagian dari kebijakan industrialisasi. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah produk domestik melalui proses pengolahan di dalam negeri sebelum dipasarkan ke pasar internasional. Menurut Porter (1990), penciptaan nilai tambah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing suatu negara dalam perdagangan internasional.

Kebijakan industri juga diarahkan untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi. Dalam era ekonomi digital, kemampuan menghasilkan inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Freeman dan Soete (2009) menegaskan bahwa inovasi teknologi merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang

dan peningkatan produktivitas industri.

Dengan demikian, kebijakan industri menjadi instrumen strategis yang memungkinkan negara memperkuat struktur ekonomi nasional. Melalui kombinasi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pengembangan teknologi, dan penciptaan nilai tambah, kebijakan industri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan Kebijakan Industri Indonesia di Era Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap arah kebijakan industri di berbagai negara, termasuk Indonesia. Integrasi ekonomi dunia yang semakin kuat menuntut setiap negara untuk meningkatkan daya saing industrinya agar mampu bertahan dalam persaingan internasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan industri tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekspor dan partisipasi dalam pasar global. Menurut Hill (2022), globalisasi mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi industri guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Pada masa awal pembangunan ekonomi, kebijakan industri Indonesia lebih menitikberatkan pada strategi substitusi impor. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri dengan membangun industri dalam negeri yang mampu memproduksi barang kebutuhan nasional. Namun, pendekatan tersebut menghadapi berbagai keterbatasan karena kurang mampu meningkatkan daya saing

industri di pasar internasional. Oleh karena itu, sejak dekade 1980-an pemerintah mulai mengarahkan kebijakan industri menuju strategi promosi ekspor.

Perubahan orientasi kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional. Melalui kebijakan promosi ekspor, pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, termasuk insentif investasi dan penyederhanaan regulasi. Menurut Krugman dan Obstfeld (2018), strategi promosi ekspor dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mampu memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas industri.

Memasuki era globalisasi yang semakin kompetitif, pemerintah Indonesia mulai menekankan pentingnya penguatan daya saing industri nasional melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi produksi dan distribusi barang. Porter (1990) menjelaskan bahwa daya saing suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, inovasi, dan lingkungan bisnis yang mendukung perkembangan industri.

Perkembangan teknologi digital juga memengaruhi arah kebijakan industri Indonesia. Pemerintah mendorong transformasi industri melalui penerapan teknologi digital dan pengembangan industri berbasis inovasi. Program Making Indonesia 4.0 merupakan salah satu upaya untuk mempercepat transformasi industri nasional agar mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0. Schwab (2017) menyatakan bahwa

revolusi industri 4.0 telah mengubah pola produksi global sehingga negara perlu mempersiapkan industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain transformasi digital, kebijakan hilirisasi sumber daya alam menjadi fokus utama pembangunan industri nasional. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah produk domestik melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Dengan demikian, perkembangan kebijakan industri Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari pendekatan proteksionis menuju strategi yang lebih kompetitif dan berorientasi global. Perubahan tersebut mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi internasional serta meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Konsep dan Karakteristik Global Value Chain

Global Value Chain (GVC) merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi global modern yang menjelaskan bagaimana proses produksi suatu barang atau jasa tersebar di berbagai negara. Dalam sistem ini, setiap negara berkontribusi pada tahapan produksi tertentu sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon (2005) mendefinisikan *Global Value Chain* sebagai jaringan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai pelaku dan negara dalam proses penciptaan nilai suatu produk.

Perkembangan Global Value Chain didorong oleh kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi yang memungkinkan perusahaan mengelola proses produksi lintas negara secara lebih efisien. Perusahaan multinasional dapat membagi tahapan produksi ke berbagai lokasi yang menawarkan biaya produksi lebih rendah atau sumber daya yang lebih kompetitif. Menurut Baldwin (2016), kemajuan teknologi telah memungkinkan terjadinya fragmentasi produksi yang menjadi karakteristik utama Global Value Chain.

Salah satu karakteristik utama GVC adalah adanya pembagian kerja internasional yang semakin kompleks. Suatu produk dapat dirancang di satu negara, diproduksi di negara lain, dan dipasarkan secara global. Kondisi ini menciptakan keterhubungan yang erat antara negara-negara dalam sistem produksi dunia sehingga meningkatkan ketergantungan ekonomi antarnegara.

Karakteristik berikutnya adalah adanya distribusi nilai tambah yang tidak merata pada setiap tahapan produksi. Tahapan yang berkaitan dengan penelitian, desain, inovasi, dan pemasaran umumnya menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas produksi bahan baku atau perakitan. Menurut Gereffi (2018), negara yang mampu menguasai aktivitas bernilai tambah tinggi akan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dalam rantai nilai global.

Global Value Chain juga ditandai oleh dominasi perusahaan multinasional yang berperan sebagai pengendali utama jaringan produksi global. Perusahaan-perusahaan tersebut menentukan standar produksi, kualitas produk, serta hubungan antara pemasok dan

konsumen dalam rantai nilai. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi negara berkembang untuk meningkatkan posisi mereka dalam jaringan produksi internasional.

Bagi negara berkembang, keterlibatan dalam *Global Value Chain* memberikan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap teknologi, investasi, dan pasar internasional. Melalui partisipasi dalam GVC, negara dapat meningkatkan kapasitas industri dan mempercepat proses industrialisasi. Namun demikian, keterlibatan tersebut harus didukung oleh kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan industri domestik agar tidak hanya menjadi pemasok bahan baku.

Berdasarkan uraian tersebut, Global Value Chain merupakan fenomena penting yang memengaruhi pola produksi dan perdagangan dunia. Pemahaman terhadap konsep dan karakteristik GVC menjadi dasar bagi negara dalam merumuskan strategi yang dapat meningkatkan daya saing serta memperkuat posisi dalam ekonomi global.

Posisi Indonesia dalam Global Value Chain

Keterlibatan Indonesia dalam Global Value Chain merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional di era globalisasi. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk berpartisipasi dalam berbagai jaringan produksi global. Menurut OECD (2023), partisipasi dalam Global Value Chain dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui integrasi dengan pasar internasional.

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjadi bagian dari rantai nilai global dalam berbagai sektor, seperti industri elektronik, otomotif, tekstil, kelapa sawit, pertambangan, dan perikanan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam proses produksi internasional. Namun, sebagian besar kontribusi tersebut masih berada pada tahapan produksi yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah.

Posisi Indonesia dalam rantai nilai global masih banyak didominasi oleh aktivitas penyediaan bahan baku dan produk setengah jadi. Kondisi ini menyebabkan nilai ekonomi yang diperoleh relatif lebih kecil dibandingkan negara yang menguasai desain, teknologi, dan pemasaran produk. Menurut Gereffi (2018), negara berkembang perlu melakukan *upgrading* dalam rantai nilai global agar mampu meningkatkan nilai tambah dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Kemampuan teknologi yang terbatas menyebabkan industri nasional masih bergantung pada impor mesin, bahan baku, dan teknologi produksi dari luar negeri. Akibatnya, posisi Indonesia dalam rantai nilai global belum sepenuhnya optimal.

Selain faktor teknologi, kualitas sumber daya manusia juga memengaruhi kemampuan Indonesia dalam meningkatkan posisi dalam Global Value Chain. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi menjadi kebutuhan utama dalam industri modern yang semakin berbasis teknologi dan inovasi. Becker (1993) menjelaskan bahwa investasi

dalam pengembangan modal manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dalam Global Value Chain melalui pembangunan kawasan industri, peningkatan investasi, dan pengembangan industri berbasis teknologi. Program hilirisasi industri juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam rantai nilai global. Namun, pencapaian tersebut memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, penguatan industri nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi agar Indonesia dapat bergerak menuju aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Manfaat Global Value Chain bagi Perekonomian Indonesia

Keterlibatan Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVC) memberikan berbagai manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional. Salah satu manfaat utama adalah meningkatnya akses terhadap pasar internasional. Melalui partisipasi dalam rantai nilai global, produk-produk Indonesia dapat menjadi bagian dari jaringan produksi dunia sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar global. Menurut Gereffi (2018), integrasi dalam GVC memungkinkan negara berkembang memperluas jaringan perdagangan dan meningkatkan volume ekspor secara berkelanjutan.

Selain memperluas pasar, GVC juga mendorong masuknya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Investasi asing membawa modal, teknologi, serta praktik manajemen modern yang dapat meningkatkan produktivitas industri nasional. Dunning (2015) menjelaskan bahwa investasi asing memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi.

Manfaat berikutnya adalah terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan-perusahaan domestik yang terlibat dalam rantai produksi global memiliki kesempatan untuk mempelajari teknologi baru, standar kualitas internasional, serta sistem manajemen yang lebih modern. Proses ini berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan industri nasional dalam menghasilkan produk yang lebih kompetitif.

Keterlibatan dalam GVC juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan yang menjadi bagian dari rantai nilai global umumnya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi sehingga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Becker (1993) menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, GVC berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru, terutama pada sektor manufaktur dan industri pengolahan. Bertambahnya aktivitas produksi akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran

dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi dalam Global Value Chain menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Industrialisasi sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Nasional

Industrialisasi merupakan proses transformasi ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional. Proses ini menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing suatu negara di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurut Todaro dan Smith (2021), industrialisasi merupakan motor penggerak pembangunan ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi.

Salah satu manfaat utama industrialisasi adalah peningkatan produktivitas nasional. Industri manufaktur umumnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, peningkatan peran sektor industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Industrialisasi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Pertumbuhan sektor industri akan meningkatkan permintaan tenaga kerja pada berbagai bidang, mulai dari produksi hingga manajemen. Menurut Lewis (1954), perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor industri merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pembangunan ekonomi.

Selain menciptakan lapangan kerja, industrialisasi mendorong

perkembangan teknologi dan inovasi. Aktivitas industri yang kompetitif menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk melalui pemanfaatan teknologi modern. Porter (1990) menjelaskan bahwa inovasi merupakan sumber utama keunggulan kompetitif yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam pasar global.

Dalam konteks Indonesia, industrialisasi menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Melalui pengembangan industri pengolahan dan manufaktur, Indonesia dapat menciptakan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat posisi dalam perdagangan internasional.

Tantangan Industrialisasi Indonesia di Era Ekonomi Global

Meskipun industrialisasi memberikan banyak manfaat bagi pembangunan ekonomi, proses industrialisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya penguasaan teknologi industri. Banyak sektor industri nasional yang masih bergantung pada teknologi impor sehingga daya saingnya relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara industri maju.

Tantangan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Perkembangan industri modern membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang teknologi, manajemen, dan inovasi. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Menurut Becker (1993), kualitas sumber daya manusia

merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan bagi proses industrialisasi. Infrastruktur transportasi, energi, dan logistik yang belum merata menyebabkan biaya produksi dan distribusi menjadi lebih tinggi. Kondisi ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Ketergantungan tersebut menyebabkan sektor industri rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan rantai pasok global. Situasi ini semakin terlihat ketika terjadi krisis ekonomi atau gangguan perdagangan internasional.

Tantangan lainnya adalah persaingan global yang semakin ketat akibat perkembangan teknologi dan liberalisasi perdagangan. Negara-negara berkembang harus bersaing dengan negara maju yang memiliki keunggulan teknologi, modal, dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Strategi Penguatan Peran Negara dalam Mendukung Global Value Chain dan Industrialisasi

Peran negara menjadi sangat penting dalam mendukung keterlibatan Indonesia dalam Global Value Chain dan mempercepat industrialisasi nasional. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat kebijakan industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan penguasaan teknologi. Menurut Rodrik (2016), kebijakan

industri yang efektif mampu mendorong transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi.

Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi pada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang berkualitas akan memperlancar aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan sehingga mampu meningkatkan efisiensi industri nasional. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi.

Strategi berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Peningkatan kualitas tenaga kerja akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan produktivitas industri. Becker (1993) menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Negara juga perlu mendorong pengembangan riset dan inovasi melalui kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Menurut Freeman dan Soete (2009), inovasi merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan suatu negara dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan posisi dalam rantai nilai global.

Selain itu, penguatan tata kelola dan penyederhanaan regulasi perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Regulasi yang efektif akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor industri. Dengan berbagai strategi tersebut, negara dapat

memainkan peran yang lebih optimal dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Model Integratif Peran Negara dalam Memperkuat Daya Saing Ekonomi Global

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu negara dalam menghadapi ekonomi global tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme pasar semata. Diperlukan sinergi antara kebijakan negara, penguatan industri nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi. Negara berperan sebagai aktor utama yang mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Model integratif peran negara dalam ekonomi global dapat dibangun melalui empat pilar utama, yaitu kebijakan industri, penguatan Global Value Chain, industrialisasi berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia. Keempat pilar tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam meningkatkan daya saing nasional. Menurut Porter (1990), keunggulan kompetitif suatu negara ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai faktor ekonomi secara efektif.

Pilar pertama adalah kebijakan industri yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan nilai tambah. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan kemampuan bersaing dalam pasar global. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Pilar kedua adalah penguatan partisipasi dalam Global Value Chain. Keterlibatan yang lebih tinggi dalam

rantai nilai global memungkinkan Indonesia memperoleh akses terhadap teknologi, pasar, dan investasi internasional. Namun, partisipasi tersebut harus diarahkan pada aktivitas yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh menjadi lebih optimal.

Pilar ketiga dan keempat adalah industrialisasi berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia. Industrialisasi yang didukung oleh inovasi teknologi dan tenaga kerja yang kompeten akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Dengan mengintegrasikan keempat pilar tersebut, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Peran negara dalam ekonomi global memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional di tengah dinamika globalisasi yang semakin kompleks. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, katalisator, dan penggerak pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis. Dalam konteks Indonesia, kebijakan industri menjadi instrumen utama yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat struktur ekonomi, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Melalui berbagai kebijakan seperti hilirisasi industri, pembangunan kawasan industri, peningkatan investasi, dan

transformasi digital, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan industri yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVC) memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan ekspor, memperoleh transfer teknologi, menarik investasi asing, serta memperluas akses terhadap pasar internasional. Namun demikian, posisi Indonesia dalam rantai nilai global masih didominasi oleh aktivitas yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas industri nasional melalui penguasaan teknologi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Industrialisasi menjadi strategi penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional karena mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor yang memiliki nilai tambah tinggi.

Berdasarkan hasil kajian, penguatan peran negara perlu dilakukan melalui kebijakan industri yang adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, pengembangan riset dan inovasi, serta penguatan tata kelola ekonomi yang mendukung iklim investasi. Sinergi antara kebijakan industri, partisipasi dalam *Global Value Chain*, dan industrialisasi yang berkelanjutan akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, negara memiliki posisi strategis dalam mengarahkan pembangunan ekonomi agar mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20(2), 189–207.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Chang, H. J. (2002). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. London: Anthem Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunning, J. H. (2015). *International Production and the Multinational Enterprise*. London: Routledge.
- Freeman, C., & Soete, L. (2009). *Developing Science, Technology and Innovation Indicators What We Can Learn from the Past*. Research Policy, 38(4), 583–589.
- Gereffi, G. (2018). Global Value Chains and Development. In S. Ponte, G. Gereffi, & G. Raj-Reichert (Eds.), *Handbook on Global Value Chains*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The Governance of Global Value Chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.
- Hill, C. W. L. (2022). *International Business Competing in the Global Marketplace* (14th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2018). *International Economics Theory and Policy* (11th ed.). New York: Pearson Education.
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State Debunking Public vs Private Sector Myths*. London: Anthem Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Global Value Chains and Economic Development Report 2023*. Paris: OECD Publishing.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W. W. Norton & Company.
- Rodrik, D. (2016). Premature Deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1–33.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Stiglitz, J. E. (2018). *Globalization and Its Discontents Revisited Anti-Globalization in the Era of Trump*. New York: W. W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education.
- World Bank. (2023). *World Development Report 2023 Migrants, Refugees, and Societies*. Washington, DC: World Bank.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.